



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 185 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di Daerah Kabupaten Garut, rehabilitasi sarana dan prasarana Satuan Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Lanjut Usia Sukabumi akibat dampak bencana alam, dan pemeliharaan bangunan Anjungan Jawa Barat di Taman Mini Indonesia Indah, perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan dan belanja Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 581);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 185) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 185 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 185) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran V, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 39

**PERATURAN GUBERNUR
JAWA BARAT**

**Lampiran I
Perubahan Atas Ringkasan
Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan**

TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.362.075.736.757	21.362.075.736.757	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	19.759.612.472.108	19.759.612.472.108	0	0 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.443.370.574.000	8.443.370.574.000	0	0 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	315.409.150.253	315.409.150.253	0	0 %
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	312.226.106.848	312.226.106.848	0	0 %
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	2.705.759.914	2.705.759.914	0	0 %
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	66.641.700	66.641.700	0	0 %
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	410.641.791	410.641.791	0	0 %
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	719.012.640.864	719.012.640.864	0	0 %
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	717.598.658.895	717.598.658.895	0	0 %
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	128.281.324	128.281.324	0	0 %
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1.285.700.645	1.285.700.645	0	0 %
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	4.037.693.520.567	4.037.693.520.567	0	0 %
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	4.013.799.170.461	4.013.799.170.461	0	0 %
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	11.294.366.137	11.294.366.137	0	0 %
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	679.987.796	679.987.796	0	0 %
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	11.919.996.173	11.919.996.173	0	0 %
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	31.256.233.933	31.256.233.933	0	0 %
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	23.086.470.654	23.086.470.654	0	0 %
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	6.828.612.662	6.828.612.662	0	0 %
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	186.063.585	186.063.585	0	0 %
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1.155.087.032	1.155.087.032	0	0 %
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	8.377.318.395	8.377.318.395	0	0 %
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	443.822.751	443.822.751	0	0 %
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	7.857.279.683	7.857.279.683	0	0 %
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	9.655.087	9.655.087	0	0 %
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	66.560.874	66.560.874	0	0 %
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	408.218.104.726	408.218.104.726	0	0 %
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	403.930.223.031	403.930.223.031	0	0 %
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.752.852.609	1.752.852.609	0	0 %
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	210.249.430	210.249.430	0	0 %
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	2.324.779.656	2.324.779.656	0	0 %
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	404.125.363.456	404.125.363.456	0	0 %
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	337.488.608.058	337.488.608.058	0	0 %
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	63.401.784.190	63.401.784.190	0	0 %
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	79.091.454	79.091.454	0	0 %
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	3.155.879.754	3.155.879.754	0	0 %
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	127.912.373.647	127.912.373.647	0	0 %
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	49.391.028.393	49.391.028.393	0	0 %
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	78.101.057.978	78.101.057.978	0	0 %
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	21.997.457	21.997.457	0	0 %
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	398.289.819	398.289.819	0	0 %
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	35.081.731.496	35.081.731.496	0	0 %
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	34.037.782.920	34.037.782.920	0	0 %
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	1.009.592.870	1.009.592.870	0	0 %
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.742.992	1.742.992	0	0 %
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	32.612.714	32.612.714	0	0 %
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	2.352.901.988.324	2.352.901.988.324	0	0 %
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	2.349.965.569.481	2.349.965.569.481	0	0 %
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	101.210.137	101.210.137	0	0 %
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	2.835.208.706	2.835.208.706	0	0 %
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.288.458.682	3.288.458.682	0	0 %
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	3.107.012.904	3.107.012.904	0	0 %
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	6.762.680	6.762.680	0	0 %
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	174.683.098	174.683.098	0	0 %

PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	-100.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	757.540.088.392	757.540.088.392	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(15.166.073.528)	(15.166.073.528)	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

**Lampiran II
Perubahan Atas Penjabaran
APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan**

TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI JAWA BARAT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH						
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000	50.000.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000	50.000.000	0		
Jumlah Pendapatan											50.000.000	50.000.000	0			
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA						
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	10.120.390.546.914	10.120.390.546.914	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.837.198.217.205	5.837.198.217.205	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.089.894.442.748	3.089.894.442.748	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6.712.521.000	6.712.521.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2			BELANJA MODAL	6.712.521.000	6.712.521.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.710.821.000	6.710.821.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.710.821.000	6.710.821.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.710.821.000	6.710.821.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.700.000	1.700.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	05	05	Belanja Modal Tanaman	1.700.000	1.700.000	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	05	05	01	Belanja Modal Tanaman	1.700.000	1.700.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	40.599.817.864	40.599.817.864	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	40.599.817.864	40.599.817.864	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	40.599.817.864	40.599.817.864	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	05	05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.599.817.864	40.599.817.864	0			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	05	05	01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.599.817.864	40.599.817.864	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	6.942.000.000	6.942.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2			BELANJA MODAL	0	6.942.000.000	6.942.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	6.942.000.000	6.942.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	6.942.000.000	6.942.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	6.942.000.000	6.942.000.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	0	2.970.000.000	2.970.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2			BELANJA MODAL	0	2.970.000.000	2.970.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.970.000.000	2.970.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	2.970.000.000	2.970.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	2.970.000.000	2.970.000.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	2.982.000.000	2.982.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2			BELANJA MODAL	0	2.982.000.000	2.982.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.982.000.000	2.982.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	2.982.000.000	2.982.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	2.982.000.000	2.982.000.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	0	9.112.000.000	9.112.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2			BELANJA MODAL	0	9.112.000.000	9.112.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	9.112.000.000	9.112.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	9.112.000.000	9.112.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	9.112.000.000	9.112.000.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	0	4.585.000.000	4.585.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	0	1.626.000.000	1.626.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	05		Belanja Hibah	0	1.626.000.000	1.626.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	05	05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	1.626.000.000	1.626.000.000			
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	05	05	01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.626.000.000	1.626.000.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2			BELANJA MODAL	0	2.959.000.000	2.959.000.000			

PROVINSI JAWA BARAT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOAAN PERBATASAN
 Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	6.569.742.499	6.569.742.499	0			
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.188.273.494	2.300.541.138	112.267.644			
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.662.342.154	1.697.243.940	34.901.786			
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.502.252	166.127.636	22.625.384		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	45.720.000	45.720.000	0		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	76.800.000	78.490.000	1.690.000		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.360.240	99.360.240	0		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.427.496	1.427.496	0		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.646	23.646	0		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	09	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN	147.566.616	198.248.820	50.682.204		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	10	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.882.771	3.474.842	592.071		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	01	11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN	8.648.319	10.424.518	1.776.199		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.381.469.005	4.109.092.711	(272.376.294)		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.381.469.005	4.058.201.361	(323.267.644)		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	25.891.350	25.891.350		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0	25.000.000	25.000.000		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	160.108.650	160.108.650		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	0	160.108.650	160.108.650		
Jumlah Belanja											12.184.633.709	12.184.633.709	0			
Total Surplus/(Defisit)											(12.184.633.709)	(12.184.633.709)	0			
0	00	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

Lampiran V
Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR TAHUN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
SUB KEGIATAN : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kabupaten Bogor	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Bogor	119.870.331.840	Penerima Bantuan Iuran (PBI)
2	Kabupaten Bogor	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Kecamatan Rumpin, Sukamakmur, Cigudeg, Jasinga, Parungpanjang, Dramaga, Tenjolaya, Ciawi, Cijeruk, Sukajaya, Klapanunggal, Leuwiliang, Nanggung, Tanjungsari, Jonggol, Cariu, Caringin, Pamijahan, Tenjo, Cigombong, Citeureup., Kab. Bogor	686.400.000	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil
3	Kabupaten Bogor	Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Kecamatan Rumpin, Sukamakmur, Cigudeg, Jasinga, Parungpanjang, Dramaga, Tenjolaya, Ciawi, Cijeruk, Sukajaya, Klapanunggal, Leuwiliang, Nanggung, Tanjungsari, Jonggol, Cariu, Caringin, Pamijahan, Tenjo, Cigombong, Citeureup, Kab. Bogor	1.800.000.000	Kesejahteraan Guru Bantu SD Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil
4	Kabupaten Bogor	Pembangunan Jaringan Irigasi kp. demplot rt.002/005 desa mekarsari	200.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi kp. demplot rt.002/005 desa mekarsari
5	Kabupaten Bogor	Peningkatan Jalan Kp. Sukahurip RT. 003/006	200.000.000	Peningkatan Jalan Kp. Sukahurip RT. 003/006 Desa Cibadak Kec. Tanjungsari-Bogor
6	Kabupaten Bogor	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di salah satu desa, di kabupaten bogor	125.000.000	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
7	Kabupaten Bogor	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di 40 kecamatan	250.000.000	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
8	Kabupaten Bogor	TNI Manunggal Membangun Desa di salah satu desa, di kabupaten bogor	260.000.000	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
9	Kabupaten Sukabumi	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sukabumi	37.932.390.720	Penerima Bantuan Iuran (PBI)
10	Kabupaten Sukabumi	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Kabupaten Sukabumi	1.082.400.000	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil
11	Kabupaten Sukabumi	Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Tonjong, Kecamatan Palabuhanratu	3.000.000.000	Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Tonjong, Kecamatan Palabuhanratu
12	Kabupaten Sukabumi	Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Talaga	1.000.000.000	Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Talaga
13	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jaya Mekar, Desa Tugubandung, Kec. Kabandungan	500.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jaya Mekar, Desa Tugubandung, Kec. Kabandungan
14	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sabilulungan, Desa Cipeundeuy, Kec. Kabandungan	500.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sabilulungan, Desa Cipeundeuy, Kec. Kabandungan
15	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cinala, Desa Sukatani, Kecamatan Parakansalak	500.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cinala, Desa Sukatani, Kecamatan Parakansalak
16	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cipalasari, Desa Palasarihilir, Kec. Parungkuda	500.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cipalasari, Desa Palasarihilir, Kec. Parungkuda
17	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cingenca, Desa Walangsari, Kec. Kalapanunggal	500.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cingenca, Desa Walangsari, Kec. Kalapanunggal
18	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciraden, Kecamatan Cisaat	700.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciraden, Kecamatan Cisaat
19	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipamutih 2 Kec. Ciambar	750.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipamutih 2 Kec. Ciambar
20	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibatu, Kec. Cikembar	750.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibatu, Kec. Cikembar
21	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciukir, Kec. Ciambar	800.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciukir, Kec. Ciambar
22	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimanggu, Kec. Kabandungan	750.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimanggu, Kec. Kabandungan
23	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihamerang, Kec. Kabandungan	750.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihamerang, Kec. Kabandungan
24	Kabupaten Sukabumi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibojoing, Bojonglopang, Kec. Jampang Tengah	700.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibojoing, Bojonglopang, Kec. Jampang Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR TAHUN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7984	Desa Legokjawa	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7985	Desa Limusgede	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Limusgede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7986	Desa Kadongdong	Kampung Caang Desa Kadongdong, Kec. Banjarwangi, Kab. Garut	72.020.000	Bantuan Desa
7987	Desa Jatimulya	Peningkatan Jalan Desa Jl. SMPN 1 Pameungpeuk No. 01, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut	500.000.000	Bantuan Desa
7988	Desa Sindangprabu	Peningkatan Jalan Desa Kp. Garawangsa RW. 03 Desa Sindangprabu, Kec. Wanaraja, Kab. Garut	200.000.000	Bantuan Desa
7989	Desa Sundawenang	Peningkatan Jalan Desa TPT JALAN LEUWI GEDE KP. MEKARWANGI LEGONG LEUWI GEDE, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya	700.000.000	Bantuan Desa
7990	Desa Madalakasih	Peningkatan Jalan Desa Jl. Tambakbaya, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut	500.000.000	Bantuan Desa
7991	Desa Setiawaras	Peningkatan Jalan Desa Kp. Wangunsari, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya	300.000.000	Bantuan Desa
7992	Desa Licin	Peningkatan Jalan Desa Dusun Margamukti Rt.04 Rw.05 Desa Licin Kecamatan Cimalaka, Kab. Sumedang	100.000.000	Bantuan Desa
7993	Desa Sukamenak	Akses Lokasi Desa Wisata Dusun Munjul Rt 01 Rw 01 sampai dengan Rt 01 Rw 03, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang	200.000.000	Bantuan Desa
7994	Desa Serang	Peningkatan Jalan Desa Dsn. Psntren-Sudpth Rw.6, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang	200.000.000	Bantuan Desa
7995	Desa Lainnya di Jawa Barat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	20.837.113.000	Bantuan Desa
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN			3.797.208.049.644	
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			3.797.208.049.644	
TOTAL			3.797.208.049.644	

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL